

Analisis Kekerasan Gangster dan Instabilitas Politik di Haiti

Muhammad Fikhar Suratman¹, Nur Isdah Idris²

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Makassar

Email: fikharsn@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission: 10 June 2025

Accepted: 17 June 2025

Published: 30 June 2025

Keywords:

Political Instability;

Gangster Violence;

Security



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ABSTRACT

This study aims to elaborate on the significant increase in gang violence in Haiti, which is closely linked to political instability and systemic issues within the country. This is because political dysfunction and state weakness have contributed to the spread of gang violence, which has now become a dominant force in Haiti's social and political landscape. This study focuses on adopting Johan Galtung's human security framework and violence theory to analyze the complex interactions between physical, structural, and cultural violence in Haiti. This study uses a qualitative methodology with a desk study approach, focusing on President Jovenel Moïse's leadership, authoritarian rule, widespread corruption, and the postponement of elections that have created a power vacuum. This study finds a direct link between the weakness of the Haitian government and the increasing role of non-state actors, which fill the power vacuum that should be held by the state. This study also finds profound consequences for human security, particularly related to freedom from fear and freedom from want, as gang violence has led to the collapse of basic public services, shortages of basic goods, and mass displacement.

PENDAHULUAN

Republik Haiti, sebuah negara yang letaknya berada di benua Amerika khususnya di wilayah Karibia dengan jumlah populasi penduduknya sebanyak 11,9 juta jiwa. Berdasarkan Indeks Kebebasan Ekonomi pada tahun 2025, Haiti berada pada peringkat ke-163 sebagai ekonomi terbebas sekaligus negara termiskin dari 184 negara di dunia. Beberapa faktor yang menyebabkan negara Haiti hidup dalam garis kemiskinan disebabkan oleh bencana alam yang berupa gempa bumi yang terjadi pada tahun 2010, pada saat itu Haiti mengalami bencana gempa bumi yang berkekuatan 7.0 Skala Richter (SR) yang diikuti oleh 52 gempa susulan (Rizqi, 2024). Hal tersebut memberi dampak yang sangat parah bagi Haiti, sekitar 316.000 penduduk meninggal dunia, 300.000 terluka, dan 2 juta mengungsi, serta 3 juta penduduk lainnya terkena dampak langsung akibat dari bencana gempa bumi ini termasuk infrastruktur. Selanjutnya, pada 14 Agustus 2021 bencana gempa bumi berkekuatan 7.2 SR kembali mengguncang Haiti menyebabkan lebih dari 2.200 nyawa penduduk meninggal, 12.700 terluka, dan 130.000 rumah hancur (UNICEF, 2021). Sebelum terjadinya gempa bumi ini, Haiti telah menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Haiti mengalami instabilitas politik yang pada saat itu dibawah kepemimpinan Presiden Jovenel Moïse.

Presiden Jovenel Moïse yang menjabat pada masa tersebut menunda pemilihan umum yang membuat dirinya menjadi penguasa tunggal, sehingga Presiden Jovenel Moïse dianggap sangat otoriter, walaupun pada saat itu terdapat konstitusi yang mengatur sebuah negara yang demokratis. Akibatnya, berujung pada pembunuhan terhadap Presiden Jovenel Moïse dikediamannya pada 7 Juli 2021. Motif dari pembunuhan ini dilakukan dengan motif politik oleh Dr. Sanon yang bercita-cita ingin menjadi presiden



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Haiti, dibantu dengan sekelompok tentara bayaran asing berasal dari Kolombia (BBC, 2023). Setelah kematian presiden Jovenel Moise pada tahun 2021, hal tersebut justru memicu kemunculan gangster di Haiti yang berusaha memiliki pengaruh dan menduduki kursi pemerintahan Haiti. Menurut *International Crisis Group and Caribbean Briefing N°44* (2021), kekerasan gangster dapat dipicu karena adanya keinginan untuk mempertahankan diri bagi mereka yang tidak memiliki pilihan untuk hidup (pengangguran) dan menghadapi kehidupan yang suram sehingga secara terpaksa melakukan ancaman dan dominasi atas suatu hal. Selanjutnya, menurut Astuti et al., (2022), munculnya kekerasan gangster umumnya dapat disebabkan oleh kemiskinan, serta lemahnya institusi kepolisian dan frustrasi, termasuk adanya ketidaksetaraan dan hasrat suatu kelompok kriminal untuk membalaskan dendam.

Berawal dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung dan adanya faktor kemiskinan dapat menjadi penyebab munculnya kekerasan gangster. Meskipun kekerasan gangster ini merupakan fenomena global yang dapat dialami oleh suatu negara, akan tetapi sangat buruk dampaknya bila terjadi pada negara yang berpenghasilan rendah, seperti negara Haiti itu sendiri. Kekerasan gangster di Haiti ini kemudian dapat menimbulkan instabilitas politik, karena adanya aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok gangster untuk memiliki pengaruh di Haiti. Salah satu dalang dari ketidakstabilan di Haiti adalah munculnya kelompok gangster yang dipimpin oleh Jimmy Cherizier, seorang bos mafia yang membentuk *G9 and Family* yang merupakan federasi kriminal gangster (Setyawan, 2024). Menurut BBC (2024), Jimmy Cherizier yang juga dijuluki sebagai “*Barbecue*” sekaligus mantan anggota kepolisian menyatakan bahwa ia melakukan penyerangan yang terkoordinasi dengan tujuan menyingkirkan perdana Menteri, dengan menyatukan kelompok bersenjata dan melakukan penyerbuan terhadap penjara di ibu kota Haiti, Port-au-Prince. Hal ini kemudian memperburuk keadaan Haiti karena seiring berjalannya waktu kasus kekerasan gangster di Haiti terus meningkat dan semakin tidak terkendali akibat kosongnya kursi pemerintahan, menjadikan kondisi Haiti berada dalam ketidakstabilan (ACAPS, 2021).

Setidaknya pada tahun 2024, terdapat 2.212 masyarakat Haiti terluka dan 1.494 diculik oleh gangster, serta sebagian besar 5.601 penduduk tewas di Haiti, meningkat lebih dari 1.000 total pembunuhan dibandingkan pada tahun 2023 (OHCHR, 2025). Instabilitas yang terjadi ini merupakan akibat dari ketidakmampuan pemerintah Haiti dalam menjaga keamanan negaranya sehingga menimbulkan ketidakamanan dan krisis kemanusiaan bagi keberlangsungan hidup masyarakat di Haiti, terutama di Ibukota Port-au-Prince. Berbagai studi terdahulu yang telah mengkaji isu kekerasan gangster dan instabilitas politik di Haiti telah memberikan kontribusi dengan hasil yang beragam sekaligus menjadi landasan bagi penelitian ini untuk membahas fokus yang berbeda. Dalam hal ini kemudian terdapat penelitian-penelitian terdahulu dikumpulkan sebagai bahan perbandingan dan untuk menemukan kelebihan atau kekurangan yang telah diteliti sebelumnya. Menurut penelitian yang ditulis oleh Astuti et al., (2022) yang berjudul “Analisis Kekerasan Gangster di Haiti Dan Dampaknya Terhadap Arus Migrasi Menuju Amerika Serikat Tahun 2019-2021.” Dalam penelitian ini membahas tentang fenomena kekerasan gangster di Haiti, kemudian historis dari negara Haiti dan kekerasan gangster yang terjadi di Haiti.

Selain itu, membahas juga mengenai faktor-faktor pendorong munculnya kekerasan gangster beserta bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan. Selanjutnya, studi yang dilakukan Lindor dan Suarez (2020) membahas perihal dampak kekerasan, kejahatan, penculikan dan pendidikan di Haiti, dengan fokus pada dampak kekerasan dan kemiskinan ekstrem terhadap pendidikan dan kesehatan mental di sekolah negeri dan



perguruan tinggi di ibukota Port-au-Prince, Haiti. Penelitian tersebut kemudian menghadirkan kebaruan dibandingkan studi-studi terdahulu yang telah meneliti mengenai fenomena kekerasan gangster di Haiti. Studi yang dilakukan oleh Astuti et al., (2022) memfokuskan analisisnya pada hubungan antara kekerasan gangster dan arus migrasi ke Amerika Serikat dalam rentang waktu 2019–2021, sementara Lindor dan Suarez (2020) menyoroti dampak kekerasan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan mental di Haiti.

Berbeda dari kedua studi terdahulu tersebut, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara instabilitas politik dan meningkatnya kekerasan gangster di Haiti melalui pendekatan konsep *human security* dan teori kekerasan dari Johan Galtung, dengan menggunakan data terbaru dengan rentang waktu 2021–2024. Oleh sebab itu, penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana kekerasan gangster di Haiti dapat dipahami melalui pendekatan konsep *human security* sebagai bentuk ancaman terhadap keselamatan dan kebebasan hidup masyarakat. Penelitian ini juga akan membahas hubungan antara meningkatnya kekerasan gangster dengan instabilitas politik yang terjadi di Haiti sejak tahun 2021, serta bagaimana kedua hal tersebut saling memperburuk situasi keamanan di negara tersebut. Selain itu, penelitian ini akan menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan gangster dan instabilitas politik terhadap aspek-aspek utama dalam keamanan manusia.

METODA PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk memahami secara mendalam permasalahan kekerasan gangster yang terjadi di Haiti dan kaitannya dengan instabilitas politik yang terjadi dengan rentang waktu tahun 2021 hingga 2024. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan kondisi kekerasan gangster dan situasi politik yang terjadi di Haiti. Penelitian ini juga menggunakan konsep *human security* dan teori segitiga kekerasan dari Johan Galtung sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti, terutama dalam melihat berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti artikel jurnal, laporan resmi organisasi internasional, buku, hasil penelitian terdahulu, serta berita dari media terpercaya. Semua data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang kemudian dianalisis dan dikaitkan dengan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik analisis data dilakukan dengan membaca, memahami, dan mengelompokkan informasi yang ditemukan menjadi beberapa tema atau topik, seperti bentuk kekerasan, penyebab kekerasan, kondisi politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan cara ini, penelitian dapat memberikan penjelasan yang utuh mengenai bagaimana kekerasan gangster di Haiti terjadi, apa penyebabnya, serta bagaimana hal itu mempengaruhi keamanan dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan (Arianto & Simatupang, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Gangster di Haiti dan Konsep *Human Security*

Kekerasan merupakan fenomena yang sifatnya universal, karena fenomena ini dapat terjadi di mana saja di tengah-tengah masyarakat maupun di dunia. Fenomena kekerasan ini dapat dilakukan oleh siapa saja dan dalam berbagai bentuk, baik antar individu, antar kelompok, maupun kelompok kepada individu (Budianti & Suaswanto, 2022). Suatu individu atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan ini salah satunya dapat berupa kelompok gangster atau kelompok bersenjata tertentu. Gangster merupakan istilah



yang digunakan untuk sebuah organisasi yang dibuat oleh sekelompok orang yang terlibat dalam kasus kriminal, seperti melakukan tindakan agresif, kasar dan tidak tunduk terhadap hukum atau normal sosial (Agasta, 2025). Dalam konteks ini, kekerasan yang dilakukan suatu kelompok gangster tentu dengan tujuan untuk meraih kepentingannya, dengan bentuk kekerasan yang beragam dan dapat mengancam keamanan masyarakat. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa kekerasan gangster merupakan suatu kelompok terorganisir yang terlibat ke dalam kasus kriminal dan melakukan tindakan agresif yang mengancam individu maupun kelompok lain yang dalam hal ini dapat berupa masyarakat dalam mencapai kepentingan kelompok gangster tersebut.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dimaksud yaitu kekerasan fisik (langsung) dan kekerasan non-fisik (struktural dan kultural). Johan Galtung membagi bentuk-bentuk kekerasan tersebut yang kemudian ketiganya saling berpengaruh (Astuti, 2022). Ketiga bentuk-bentuk kekerasan ini kemudian disebut sebagai “Segitiga Kekerasan” oleh Johan Galtung. Kekerasan yang dimaksud oleh Johan Galtung ini adalah kekerasan langsung, struktural, dan kultural. Kekerasan langsung yang dimaksud yaitu kekerasan yang bisa dilihat secara nyata sekaligus dengan pelakunya, sehingga dikatakan kekerasan langsung karena bersifat fisik dan terjadi kontak langsung terhadap korban, seperti penyiksaan, pembunuhan, diskriminasi, dan lain-lain; kemudian kekerasan struktural yaitu kekerasan yang menghambat kebutuhan dasar individu-kelompok dan kekerasan ini terjadi bukan tindakan langsung oleh pelaku yang dapat diminta pertanggungjawaban, tetapi karena adanya sistem atau struktur yang menciptakan kondisi tersebut; dan kekerasan kultural, kekerasan yang melegitimasi atau menghalalkan dalam konteks secara budaya bentuk kekerasan lainnya yaitu kekerasan langsung (penyiksaan, pembunuhan) maupun kekerasan struktural (kemiskinan) (Eriyanti, 2017).

Beragamnya bentuk-bentuk kekerasan tersebut, dari kekerasan yang mengancam secara fisik hingga mempengaruhi non-fisik (struktural dan kultural) masyarakat, sehingga diperlukan pendekatan atau konsep keamanan yang inklusif. Dalam konteks ini, konsep atau teori *human security* digunakan untuk membahas keamanan individu atau kelompok masyarakat dari berbagai permasalahan yang mengancam keamanan seperti *human trafficking*, *global warning*, kelaparan, terorisme, kemiskinan, penularan penyakit, dan lain sebagainya (Mumtazinur, 2021). Sementara, menurut UNDP (*United Nations Development Program*) dalam laporannya pada tahun 1994, konsep *human security* yang dijelaskan mencakup beberapa hal yaitu, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Hal-hal tersebut kemudian dalam konsep *human security* menjadi dua komponen utama, “*freedom from fear*” dan “*freedom from want*” (UNDP, 1994). Segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok gangster untuk menguasai setiap wilayah di Haiti terutama di ibu kota, mulai dari kasus penculikan dan pembunuhan, kekerasan seksual, ancaman kekerasan fisik, serta pengendalian dan penguasaan aset menjadikan Haiti sebagai negara yang rawan dan tidak aman bagi masyarakat Haiti itu sendiri.

Hal ini disebabkan oleh para kelompok gangster yang melakukan aksinya atas kekerasan dan kekacauan yang terjadi, dengan angka yang mencapai 48 persen kasus penculikan dan pembunuhan, 46 persen kasus kekerasan seksual, 27 persen kejahatan terhadap aset di Haiti, dan sekitar 30 hingga 40 persen merupakan ancaman terhadap masyarakat Haiti terutama perempuan usia di atas 15 tahun (Astuti, 2022). Setidaknya pada tahun 2021, terdapat 2.344 korban penculikan di Haiti dengan laporan angka sekitar 4% anak-anak, 10% perempuan, dan 86% laki-laki. Jumlah kasus penculikan laki-laki sendiri jauh lebih tinggi yaitu menyentuh angka 86% atau sekitar 2.000 laki-laki dibanding



kasus penculikan perempuan dan anak-anak, hal ini karena para korban laki-laki yang diculik biasanya direkrut menjadi bagian dari gangster dan terburuknya menjadi korban pelecehan seksual. Selanjutnya kasus penculikan terhadap perempuan 10% atau sekitar 200 perempuan dan anak-anak 4% atau sekitar 90 anak yang diculik oleh para gangster tersebut menjadi korban kekerasan seksual, menimbulkan trauma secara emosional kepada para korban.

Data terbaru dari *United Nations Human Rights Office of The High Commissioner* (2025), setidaknya pada tahun 2024 terdapat 5.601 korban di Haiti akibat kekerasan gangster, meningkat sekitar 1.000 dari total pembunuhan tahun 2023. Kemudian, 2.212 korban terluka dan 1.494 korban penculikan akibat kelompok gangster di Haiti. Selain itu, para kelompok gangster melakukan serangan terhadap sektor-sektor bisnis di ibu kota, termasuk membakar apotek, dan merusak fasilitas-fasilitas seperti sekolah, pelabuhan utama dan rumah sakit menyebabkan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pengangkutan pasokan barang terutama barang medis (BBC, 2024). Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster di Haiti menunjukkan bahwa aksi kriminal tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan bentuk kekerasan struktural dan kultural sebagaimana dijelaskan oleh Johan Galtung dalam konsep "Segitiga Kekerasan". Aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok gangster seperti penculikan, pembunuhan, dan kekerasan seksual merupakan kekerasan langsung yang mengancam keselamatan individu, terutama terhadap kelompok yang rawan yaitu perempuan dan anak-anak.

Lebih lanjut, terdapat kekerasan struktural yang timbul akibat ketidakmampuan negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat, seperti layanan kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Selain itu, kekerasan kultural memperkuat situasi ini akibat ketidakpedulian sosial dan lemahnya norma yang menolak kekerasan. Dalam konteks ini, pendekatan *human security* menjadi relevan, karena menekankan pentingnya perlindungan individu dari berbagai ancaman, baik fisik maupun non-fisik. Tingginya angka korban kekerasan di Haiti serta rusaknya infrastruktur sosial akibat ulah gangster menunjukkan ancaman serius terhadap komponen-komponen utama dari *human security*, yakni *freedom from fear* dan *freedom from want*. Dengan demikian, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster di Haiti bukan hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga menjadi ancaman langsung terhadap keamanan manusia dalam arti yang paling dasar.

Hubungan antara Kekerasan Gangster dengan Instabilitas yang Terjadi di Haiti

Munculnya gangster yang menimbulkan kerusakan dan kekerasan terhadap masyarakat di Haiti tentu memiliki kaitan dengan instabilitas politik yang terjadi di Haiti yang juga berdampak pada perekonomian negaranya. Sebagai negara merdeka pertama Karibia yang dipimpin oleh orang berkulit hitam, masyarakat Haiti dulunya berada pada masa kolonial Prancis dan menjadi korban perbudakan selama 200 tahun, yang kemudian pada akhirnya terbebas dan menjadi negara yang merdeka. Namun, pada akhirnya Haiti tidak dapat terlepas dari permasalahan-permasalahan internal, seperti korupsi, kekerasan, dan kecacatan politik yang tidak berujung akibat penguasa diktator yang membuat Haiti sulit berkembang dan tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat Haiti. Dibawah kepemimpinan Presiden Jovenel Moise, Haiti berada pada posisi yang buruk, Haiti mengalami keresahan politik-sosial yang disertai dengan krisis ekonomi, korupsi, keamanan yang tidak memumpuni dan buruk, disertai dengan munculnya gangster-gangster yang melakukan kekerasan. Pada bulan Mei 2019, Presiden Jovenel Moise terlibat dalam skandal yang disampaikan dalam laporan tuduhan oleh Pengadilan Tinggi Auditor



Haiti kepada senat bahwa presiden dan tokoh-tokoh politik lainnya terlibat dalam penggelapan lebih dari 2 miliar dolar melalui perjanjian keuangan.

Perjanjian keuangan ini yakni perjanjian yang memberikan pembiayaan kredit bagi Haiti untuk membeli minyak mentah yang kemudian keuntungan dari penjualan tersebut harusnya mendanai investasi dalam proyek infrastruktur penting, akan tetapi tidak pernah terwujud (Alba, 2021). Kemudian pada Januari 2020, presiden Jovenel Moise memulai pemerintahannya yang dekrit dan memutuskan untuk tidak mengadakan pemilihan parlemen yang seharusnya dijadwalkan pada Oktober 2019 dengan alasan “masalah keamanan”. Selanjutnya pada Februari 2021, dikeluarkan usulan referendum oleh presiden Jovenel Moise yang akan menghapus perlindungan konstitusional yang telah diperkenalkan untuk membatasi kekuasaan presiden setelah diktator Jean Claude Duvalier yang digulingkan pada tahun 1980-an. Hal ini kemudian menimbulkan protes besar-besaran di Haiti terhadap presiden Jovenel Moise akibat penetapan masa jabatan lima tahun presidennya telah berakhir pada awal tahun 2021. Akan tetapi, Jovenel Moise mengatakan bahwa sebelum Jovenel Moise menjabat sebagai presiden terdapat penundaan, sehingga yakin akan mendapatkan perpanjangan masa jabatan selama satu tahun hingga 7 Februari 2022 yang kemudian berujung pada penolakan besar-besaran di dalam Haiti.

Dengan begitu, kelompok oposisi mencoba untuk melakukan pemerintahan paralel pada 7 Februari 2021 akibat Jovenel Moise melakukan perpanjangan masa jabatan yang berakhir menyebabkan penangkapan sebanyak dua puluh orang, termasuk seorang hakim Mahkamah Agung karena dianggap sebagai “percobaan kudeta” dan pada akhirnya presiden Jovenel Moise tetap berkuasa (Alba, 2021). Pada akhirnya, hal ini kemudian menimbulkan insiden pembunuhan presiden Jovenel Moise di kediamannya pada 7 Juli 2021 sehingga memperburuk keadaan di Haiti. Pasca kematian presiden Jovenel Moise, jabatannya kemudian diisi oleh Perdana Menteri (PM) Ariel Henry akibat pemilihan umum yang seharusnya dijadwalkan pada tahun 2022 tertunda dengan ketentuan waktu yang tidak jelas. Akan tetapi, kondisi Haiti yang berada dibawah kepemimpinan PM Ariel Henry pada saat itu tidak membuahkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya (Rizqi, 2024). Sejak PM Ariel Henry menjabat tanpa melalui pemilihan umum pada Juli 2021 hingga awal tahun 2024 belum terdapat pemilu yang diselenggarakan dan seharusnya pada saat itu masa jabatan presiden seharusnya berakhir, akan tetapi keputusan Ariel Henry untuk menunda pemilu hingga Agustus 2025 memicu ketidakpuasan publik dan terjadi protes besar-besaran yang menuntut pengunduran dirinya (BBC, 2024).

Tuntutan ini berasal dari aliansi gangster bersenjata salah satunya *G9 and Family* yang menuntut pengunduran diri PM Ariel Henry yang saat itu melakukan kunjungan luar negeri dengan melancarkan serangan terkoordinasi di ibu kota, Port-au-Prince, dengan menyerang berbagai infrastruktur seperti bandara, kantor polisi, dan membebaskan lebih dari 4.000 narapidana dari dua penjara utama. Penyerangan ini merupakan kesempatan yang digunakan bagi gangster-gangster untuk memperkuat pengaruh dan kendali mereka di Haiti yang saat itu terjadi kekosongan kekuasaan akibat ditinggalkan oleh PM Ariel Henry yang sedang melakukan kunjungan ke luar negeri (Bubalo & Khalil, 2024). Akibatnya, sekitar 80% wilayah Port-au-Prince dikuasai oleh kelompok gangster yang ingin menuntut pengunduran diri PM Ariel Henry, mengakibatkan PM Ariel Henry tidak dapat kembali ke Haiti karena jalur transportasi bandara dikuasai oleh gangster. Hal ini kemudian berakhir pada pengajuan pengunduran diri oleh PM Ariel Henry yang secara resmi mengundurkan diri setelah dibentuknya



anggota dewan transisi dan pengunduran diri tersebut disampaikan melalui surat yang ditandatangani pada 24 April 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat (BBC, 2024).

Dewan transisi ini nantinya kemudian akan mencoba untuk mengembalikan pemerintahan yang demokratis memulihkan situasi keamanan dari berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster. Meningkatnya kekerasan oleh kelompok gangster di Haiti merupakan cerminan dari kondisi instabilitas politik yang telah berlangsung lama dan belum terselesaikan secara menyeluruh. Kekacauan ini tidak hanya disebabkan oleh tindakan kriminal oleh kelompok gangster, tetapi juga berasal dari akar persoalan sejarah dan politik negara tersebut yang tidak terlepas dari permasalahan dengan korupsi, pemerintahan otoriter, serta lemahnya institusi negara dalam menjalankan fungsinya. Sejak masa pemerintahan Presiden Jovenel Moise, situasi politik di Haiti terus memburuk seiring dengan praktik pemerintahan yang tidak demokratis, skandal korupsi besar, dan pengabaian terhadap proses pemilihan umum menimbulkan ketidakpuasan publik dan memicu protes besar-besaran.

Dalam kekosongan kekuasaan dan lemahnya sistem keamanan, kelompok gangster mengambil kesempatan untuk memperluas pengaruhnya, bahkan menggunakan kekerasan bersenjata sebagai alat untuk menekan kekuasaan politik yang bahkan mengancam keamanan masyarakat di Haiti. Kejadian seperti penyerangan terhadap infrastruktur negara, pembebasan narapidana secara massal, hingga penguasaan ibu kota menjadi bukti bahwa gangster sebagai aktor juga turut menentukan arah politik Haiti. Ketidakmampuan PM Ariel Henry dalam mengelola kondisi tersebut, termasuk penundaan pemilu dan kegagalan menjaga keamanan, berujung pada tuntutan kuat untuk mundur dari jabatannya. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kekerasan gangster di Haiti sangat erat kaitannya dengan instabilitas politik yang mendalam, di mana lemahnya kepemimpinan negara membuka ruang bagi aktor non-negara untuk mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah secara sah.

Dampak Kekerasan Gangster dan Instabilitas terhadap *Human Security* di Haiti

Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster di Haiti yang disertai dengan instabilitas politik berkepanjangan tentu telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat dari aspek seperti sosial, ekonomi, dan keamanan Haiti. Instabilitas politik yang terjadi sejak masa kepemimpinan Presiden Jovenel Moise hingga pasca kematiannya yang digantikan oleh Perdana Menteri (PM) Ariel Henry telah menciptakan kekosongan kekuasaan yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok gangster untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan mereka terutama di ibu kota Haiti, Port-au-Prince (ACAPS, 2021). Kelompok gangster memanfaatkan kondisi tersebut untuk menguasai berbagai wilayah yang dikatakan strategis, terutama ibu kota Haiti, Port-au-Prince, yang mengakibatkan lumpuhnya berbagai sektor yang penting bagi kehidupan masyarakat Haiti.

Segala aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok gangster memberi dampak pada masyarakat Haiti sehingga harus hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian keamanan. Kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh kelompok gangster ditunjukkan melalui adanya kasus pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan penguasaan aset masyarakat secara paksa di Haiti. Konsekuensi dari adanya kekerasan gangster di Haiti ini memberikan dampak secara fisik, serta secara tidak langsung berdampak pada psikologis dan sosial yang mendalam bagi korban sekaligus masyarakat di Haiti (Astuti et al., 2022). Selain itu, kekerasan gangster ini juga berdampak pada kehancuran berbagai fasilitas-fasilitas penting di Haiti, seperti pelabuhan, kantor polisi, rumah sakit, hingga sekolah



yang menghambat akses pelayanan masyarakat Haiti. Diketahui pada tahun 2022, terdapat rumah sakit dan 1.700 sekolah di ibu kota Haiti harus ditutup karena kekerasan gangster dan akibatnya masyarakat Haiti tidak dapat mengakses fasilitas tersebut (Rizqi, 2024).

Selanjutnya, para kelompok gangster juga menguasai sebagian besar pintu masuk dan keluar di ibu kota Haiti, Port-au-Prince, yang kemudian memanfaatkan hal tersebut dengan menagih uang perlindungan bagi yang akan melewati jalan tersebut agar tetap aman (Rizqi, 2024). Berbagai daerah yang dikuasai oleh kelompok gangster, salah satunya *G9 and Family*, seperti memblokir pintu masuk pelabuhan sehingga menimbulkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyebabkan transportasi dan beberapa bisnis harus menghentikan operasinya. Selanjutnya pembebasan ribuan narapidana dari penjara utama yang diakibatkan oleh kelompok gangster serta penguasaan jalur transportasi utama di Haiti, seperti pelabuhan dan bandara, juga merupakan dampak dari kelompok gangster yang telah menguasai berbagai wilayah di Haiti. Kejadian yang menimpa Haiti ini kemudian mencerminkan bahwa lemahnya pemerintah negara terhadap kelompok gangster yang menjadi aktor dominan dalam struktur sosial dan politik di Haiti.

Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kasus kelompok gangster yang disertai dengan ketiadaan sistem keamanan dalam merespons situasi krisis ini membuat masyarakat Haiti terpaksa hidup tanpa perlindungan negara. Berdasarkan sudut pandang konsep *human security*, kondisi ini merupakan bentuk ancaman yang sangat nyata terhadap aspek-aspek utama keamanan manusia, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*. Hal ini didasari dengan masyarakat Haiti yang tidak hanya hidup dalam ketakutan akibat kekerasan yang dilakukan kelompok gangster, tetapi juga kurangnya akses layanan dan akses terhadap kebutuhan dasar, seperti makanan dan tempat tinggal yang aman. Menurut Rizqi (2024), para kelompok gangster tidak hanya mengganggu pemerintah, tetapi juga menyerang sektor bisnis, mencuri bahan bakar, makanan, hingga memeras masyarakat Haiti. Dalam konteks ini, Haiti berada dalam kondisi yang tidak aman dalam konteks keamanan personal dan makanan sesuai dalam konsep *human security*.

Hal yang dapat mengancam keamanan personal ini merupakan sebuah ancaman dari individu atau sekelompok orang yang dalam konteks ini adalah kelompok gangster di Haiti yang menimbulkan perasaan takut akan kekerasan fisik maupun berbagai kekerasan seperti penyiksaan dan pemerkosaan, maupun pembunuhan di Haiti. Kemudian, keamanan makanan, situasi yang dapat menyebabkan kelaparan, kekurangan makanan, kekurangan gizi, dan minimnya akses untuk menjangkau makanan (Mumtazinur, 2021). Kondisi Haiti yang tidak stabil ini menandakan masih tidak efektifnya pemerintah Haiti dalam menangani krisis yang terjadi di dalam negaranya, hal ini kemudian menjadi salah satu faktor masyarakat Haiti harus mencari tempat yang lebih aman dan tempat sehingga kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi, bahkan faktor pendorong arus migrasi (Astuti et al., 2022).

SIMPULAN

Instabilitas politik yang terjadi sejak masa pemerintahan Presiden Jovenel Moise menunjukkan adanya praktik pemerintahan yang otoriter, korupsi yang merajalela, serta ketidakmampuan dalam melaksanakan pemilu tepat waktu. Kekosongan kekuasaan akibat penundaan pemilu dimanfaatkan oleh kelompok gangster, yang memanfaatkan momen tersebut untuk memperluas kekuasaan mereka melalui aksi kekerasan yang terkoordinasi. Penyerangan terhadap infrastruktur negara, pembebasan narapidana massal, serta penguasaan wilayah strategis di ibu kota, Port-au-Prince, menjadi indikasi



kuat bahwa kelompok gangster telah menjadi aktor dominan dalam dinamika politik Haiti. Ketidakmampuan pemerintah, khususnya Perdana Menteri Ariel Henry, dalam mengelola krisis dan ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat semakin memperburuk situasi, hingga pada akhirnya berujung pada pengunduran dirinya. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat Haiti hidup dalam ancaman nyata terhadap berbagai aspek utama dari human security, khususnya aspek *freedom from fear* dan *freedom from want*. Kekerasan yang dilakukan oleh kelompok gangster, termasuk pembunuhan, penculikan, kekerasan seksual, serta penguasaan akses transportasi dan fasilitas publik, telah mengakibatkan kelumpuhan dalam pelayanan dasar, kelangkaan bahan pokok, dan gelombang pengungsian dari wilayah yang tidak lagi aman. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan penyedia keamanan, justru gagal dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, sehingga negara kehilangan kendali atas keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, penelitian ini menemukan bahwa kekerasan gangster yang terjadi di Haiti tidak dapat dilepaskan dari konteks instabilitas politik yang berkepanjangan dan belum terselesaikan. Kondisi ini menandakan bahwa lemahnya sistem pemerintahan dan institusi keamanan telah membuka celah bagi aktor non-negara, seperti kelompok gangster, untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang seharusnya dipegang oleh negara. Penelitian ini juga menemukan bahwa pentingnya pendekatan pemulihan yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup penguatan institusi negara, pemulihan demokrasi, serta perlindungan terhadap keamanan manusia secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- ACAPS. (2021). *Haiti: Gang violence*.
<https://www.acaps.org/en/countries/archives/detail/haiti-gang-violence>
- Alba, M. (2021). Handling the aftermath of Haiti's presidential assassination. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/haiti/handling-aftermath-haitis-presidential-assassination>
- Antara News. (2021). Geng Haiti: Blokade BBM akan dibuka jika PM Henry mundur. Retrieved May 15, 2025, from <https://www.antaranews.com/berita/2484177/geng-haiti-blokade-bbm-akan-dibuka-jika-pm-henry-mundur>
- Arnaouti, M. K. C., Cahill, G., Baird, M. D., Mangurat, L., Harris, R., Edme, L. P. P., Joseph, M. N., Worlton, T., Augustin, S., & Haiti Disaster Response Junior Research Collaborative (HDR-JRC). (2022). Medical disaster response: A critical analysis of the 2010 Haiti earthquake. *Frontiers in Public Health*, 10. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.995595>
- Arianto, B., & Simatupang, L. (2025). Konsep Dasar Metoda Studi Kepustakaan. Borneo Novelty Publishing
- Astuti, P. A., Ismah, R., & Ahmad, M. M. (2022). Analisis kekerasan gangster di Haiti dan dampaknya terhadap arus migrasi menuju Amerika Serikat tahun 2019–2021. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 4(2), 53–72.
- Aulia, L. (2021). Warisan sejarah kelam kekerasan di Haiti. Retrieved May 11, 2025, from <https://www.kompas.id/baca/internasional/2021/07/09/warisan-sejarah-kelam-kekerasan-di-haiti>
- BBC News Indonesia. (2024). Kekerasan di Haiti: Geng bersenjata ancam ambil alih Haiti setelah pembobolan penjara massal, pemerintah umumkan 'keadaan darurat'.



- Retrieved May 14, 2025, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd18vjp12xqo>
- BBC. (2023). Haiti president's assassination: What we know so far. Retrieved April 12, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-57762246>
- Besheer, M. (2024). PBB: Separuh dari anggota geng bersenjata di Haiti adalah anak-anak. Retrieved May 11, 2025, from <https://www.voaindonesia.com/a/pbb-separuh-dari-anggota-geng-bersenjata-di-haiti-adalah-anak-anak/7885137.html>
- Bubalo, M., & Khalil, H. (2024). Haiti PM Ariel Henry resigns as transitional council is sworn in. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68896323>
- Budianti, Y., & Suaswanto. (n.d.). Kekerasan dalam pendidikan. *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 6(2), 144-166.
- Buschschluter, V. (2024). Ariel Henry: The rise and fall of Haiti's prime minister. Retrieved May 13, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68542077>
- Buschschluter, V. (2024). Haiti gangs: More than 50,000 flee capital after surge in violence. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68722178>
- CNBC Indonesia. (2024). Siapa Jimmy 'Barbeque' Cherizier, bos gangster kuasai 1 negara?. Retrieved May 9, 2025, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240315091204-4-522170/siapa-jimmy-barbeque-cherizier-bos-gangster-kuasai-1-negara>
- Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang kekerasan dalam perspektif feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1). <https://doi.org/10.18196/hi.61102>
- Garcia, D. A. (2024). What's behind the escalating violence in Haiti?. Retrieved May 9, 2025, from <https://www.reuters.com/world/americas/after-haiti-suffers-fresh-gang-massacre-whats-behind-escalating-violence-2024-10-05/>
- Grant, W., et al. (2024). Haiti's Prime Minister Ariel Henry resigns as law and order collapses. Retrieved May 9, 2025, from <https://www.bbc.com/news/world-latin-america-68541349>
- Heritage. (2025). Economic freedom country profile. Retrieved April 11, 2025, from <https://www.heritage.org/index/pages/country-pages/haiti>
- International Crisis Group. (2021). Haiti: A path to stability for a nation in shock. Retrieved May 9, 2025, from <https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/haiti/b44-haiti-path-stability-nation-shock>
- Ioanes, E. (2024). Haiti's prime minister is out. Here's how it got so bad. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.vox.com/world-politics/2024/3/12/24098422/haiti-prime-minister-ariel-henry-resigns-gang-violence-g9>
- Lindor, M., & Carro-Suarez, M. (2020). Extreme poverty, violence and inclusive education in Haiti: Student performance analysis from the multifactorial approach. *Cultural, Educación y Sociedad*, 12(1).
- Mumtazinur, & Yenny, S. W. (2021). Keamanan individu (personal security) dan qanun hukum keluarga: Tinjauan konsep keamanan manusia (*human security*). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76-89.
- Paultre, A., Emiliano, R., & David, C. A. (2024). Inmates escape after attacks on two prisons in Haiti's capital. Retrieved May 14, 2025, from <https://www.nytimes.com/2024/03/03/world/americas/haiti-prison-escape-gangs.html>



- Rizqi, M. M. (2024). *Peran UNICEF melalui program Humanitarian Action for Children (HAC) dalam krisis kemanusiaan di Haiti periode 2021–2022*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Setyawan, R. D., Angga, N. R., & Muhammad, F. A. (2024). Intervensi kemanusiaan Amerika Serikat terhadap Haiti pada tahun 2022. *Global Insight Journal: Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Hubungan Internasional-FISIP-UNJANI*, 1(1). <https://doi.org/10.36859/gij.v1i1.2433>
- UNDP. (1994). *Human development report 1994*. New York: Oxford University Press.
- UNICEF. (2021). Massive earthquake leaves devastation in Haiti. Retrieved April 12, 2025, from <https://www.unicef.org/emergencies/massive-earthquake-devastation-haiti>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR). (2025). Haiti: Over 5,600 killed in gang violence in 2024, UN figures show. Retrieved April 11, 2025, from <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/01/haiti-over-5600-killed-gang-violence-2024-un-figures-show>
- Worldometer. (2025). Haiti demographics. Retrieved April 11, 2025, from <https://www.worldometers.info/demographics/haiti-demographics/>

